

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang dapat di pergunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam mendapatkan keuntungan atau laba dan besar kecilnya laba sering menjadi ukuran kesuksesan suatu manajemen dalam mengolah laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh kemampuan manajemen di dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang.

Pada perusahaan dagang maupun manufaktur, pendapatan diperoleh dari penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan pada perusahaan jasa, pendapatan diperoleh dari pemberian jasa atau pelayanan kepada konsumen. Saat ini perusahaan jasa berkembang dengan pesatnya. Hal ini tidak lepas dari masyarakat yang semakin membutuhkan jasa atau pelayanan yang beragam. Konsumen akan bersedia menggunakan jasa atau pelayanan dari suatu perusahaan jasa bila mereka yakin bahwa mereka akan terpuaskan dengan jasa yang dibutuhkan tersebut.

Laba yang maksimal merupakan perantara untuk menentukan arah dan strategi, kebijaksanaan, taktik perusahaan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan membuat laporan keuangan pada setiap periode. Berdasarkan laporan yang dibuat, pihak yang berkepentingan dapat

menilai posisi keuangan dan prestasi kerja yang dicapai perusahaan. Salah satu unsur yang paling penting dari laporan laba rugi adalah pendapatan. Pendapatan merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada laporan laba rugi. Perusahaan akan memperoleh laba bila pendapatan lebih besar daripada beban, namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil daripada beban maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan.¹

Dalam akuntansi permasalahan utama mengenai pendapatan adalah pada saat pengukuran dan pengakuan itu diakui. Permasalahan ini akan terus muncul bila terjadi transaksi yang berhubungan dengan pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan harus diukur dengan pasti. Analisa yang baik akan membantu perusahaan dalam kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Jika perusahaan keliru dalam menentukan pendapatan maka akan mengakibatkan salah dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan pengukuran pendapatan tergantung berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Permasalahan pengukuran dan pengakuan pendapatan saling terkait satu sama lain. Permasalahan ini akan selalu muncul apabila sebuah transaksi berhubungan dengan pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat

¹ Valen 2013, *Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut*, Universitas Sam Ratulangi. (Diakses pada tanggal 22, februari 2015. pada pukul 12.05 WIB)

yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan, begitu juga jumlah yang diakui haruslah diukur secara tepat dan pasti.

Apabila pendapatan diakui tidak sama dengan standar akuntansi, berarti pendapatan tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba-rugi tidak tepat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan sehingga penting sekali dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan, perusahaan menggunakan suatu standar sebagai acuan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK nomor 23.

Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan pedoman resmi yang digunakan perusahaan dalam penyajian laporan keuangan. Dalam standar keuangan akuntansi ini memuat tentang pengukuran dan pengakuan pendapatan. Dengan adanya standar ini, maka laporan laba rugi perusahaan bisa dipercaya kebenarannya. Standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan suatu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi pengguna laporan tersebut.²

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa eratnya hubungan antara pendapatan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu Pendapatan dalam perusahaan membutuhkan perlakuan akuntansi yang sesuai dalam hal pengukuran dan pengakuannya. Oleh sebab itu, untuk membahas masalah ini, penulis

² Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), PSAK No. 23 Revisi 2009

mencoba memfokuskan penelitian ini pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.

PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bertugas menyediakan energi listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan energi listrik sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia, sementara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang memiliki keterbatasan dalam memenuhi peningkatan listrik tersebut. Di Indonesia PT. Perusahaan Listrik Negara/ PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.³

Masalahnya pada penerapan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan oleh PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sudah tepat atau belum sesuai dengan PSAK no 23. Hal ini menjadi sangat penting karena pada kenyataannya jika pengakuan dan pengukuran pendapatan tidak tepat maka dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan salah penyajian yang dikhawatirkan dapat menyebabkan para pengguna informasi keuangan salah dalam mengambil keputusan.

Pendapatan operasional PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bersumber dari penjualan tenaga listrik (PTL), subsidi listrik pemerintah, penyambungan pelanggan, dan pendapatan lain-lain yang dilaporkan dalam laporan laba rugi

³ Sumber: www.pln.co.id (Diakses pada tanggal 22, Februari 2015. Pada pukul 12:38 WIB)

perusahaan. Pendapatan lain-lain berupa penyewaan trafo dan sewa sistem operasi dan sewa transmisi operasi. Pendapatan yang berupa sewa tidak diperkenankan kembali untuk diakui sebagai pendapatan di PSAK No. 23 ini melainkan pendapatan mengenai sewa telah diubah dan diperbaharui peraturannya oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Sedangkan pendapatan non operasional perusahaan bersumber dari pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain.

PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang mengakui pendapatan pada saat rekening tagihan penjualan listrik telah dicetak. PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang mencatat penjualan kotor terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia barang dan jasa. Barang yang dijual berupa energi listrik, kwh meteran, kartu pelanggan prabayar (voucher), dan alat stroom listrik.⁴ Dan pegawai perusahaan menegaskan bahwa laporan laba-rugi komprehensif perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun pada kenyataannya pada laporan laba-rugi komprehensif PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang tidak terdapat akun retur penjualan. Sehingga makna dari perusahaan penyedia barang energi listrik tidak mengikuti peraturan yang berlaku umum yaitu tidak adanya retur penjualan di laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam pengungkapan retur penjualan sebagai pengurang dari penjualan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan bahwa retur penjualan berupa penggantian unit baru alat stroom listrik yang rusak bukan karena *human error*, meteran dan voucher yang tidak

⁴ Sumber wawancara dengan Bp. Agus selaku supervisor akuntansi

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan akan diganti dengan yang baru dan retur penjualan sudah termasuk dalam akun *Discount*. Tetapi menanggapi hal ini seharusnya PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang membuat akun retur penjualan di laporan laba rugi komprehensif . Sehingga makna dari laporan laba-rugi komprehensif akan sesuai dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah penelitian yang dilakukan dalam bentuk Karya ilmiah yang berjudul: “**Analisis Implementasi PSAK No. 23 dalam Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Listrik pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.**” Penulis mengharapkan karya tulis ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para pembaca agar dapat memahami mengenai Implementasi PSAK No. 23 dalam Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Listrik pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.

B. Perumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan ditemukan berkaitan dengan Implementasi PSAK No. 23 dilokasi penelitian maka Penulis melakukan perumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pengukuran dan pengakuan pendapatan yang diterapkan PT PLN (Persero) Disjaya dan tangerang?

2. Apakah pengukuran dan pengakuan pendapatan yang diterapkan PT PLN (Persero) Disjaya dan tangerang sudah sesuai dengan PSAK No. 23?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui metode pengukuran dan pengakuan pendapatan yang diterapkan PT PLN (Persero) Disjaya dan tangerang.
- b. Mengetahui pengukuran dan pengakuan pendapatan yang diterapkan PT PLN (Persero) Disjaya dan tangerang sudah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 23.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai bahan masukan apabila di lain hari dimintai pendapat mengenai Implementasi PSAK No. 23 dalam Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Listrik pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.
- 2) Menambah pengetahuan penulis mengenai Standar Akuntansi yang di terapkan di indonesia khususnya PSAK No.23.

b. Bagi Akademik

- 1) Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan berkaitan dengan Implementasi PSAK No. 23 dalam Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Listrik pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.
- 2) Memberikan arahan dan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

c. Bagi PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran penulis yang dapat dijadikan saran yang bermanfaat, khususnya mengenai Implementasi PSAK No. 23 dalam Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan.